BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sosial dan politik, kebudayaan mendapatkan ruang yang sama sebagai wujud penghormatan terhadap keadilan dan kesetaraan antar kelompok. Konsep ini sejalan dengan gagasan politik multikulturalisme yang menekankan pentingnya pengakuan dan partisipasi setara bagi semua warga negara tanpa memandang latar belakang budaya atau agama. Gagasan tersebut menjadi fondasi bagi kehidupan demokratis di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai kebhinekaan.[1]

Ditengah konfigurasi sosila dan politik indonesia budaya dan kepercayaan di Indonesia memperoleh kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial dan politik. Salah satu contohnya adalah etnis Tionghoa yang memiliki tradisi perayaan Imlek setiap tahun sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur dan budaya tionghoa. Perayaan tersebut pernah mengalami pembatasan pada masa sebelum pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Pada masa pemerintahan order baru, kebijakan pemerintah membatasi kegiatan kebudayaan Tionghoa di ruang publik, sehingga masyarakat Tionghoa tidak dapat mengekspresikan tradisi secara terbuka. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa keberagaman budaya belum sepenuhnya diterima dalam tatanan sosial politik bangsa.

[1] Muhaemin Latif. Politik multikulturalisme: Sebuah gerakan keadilan dan kesetaraan. *Jurnal Politik Profetik*, Vol. 9 No. 2 (2021): 226.

Perubahan mulai terjadi Ketika pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut larangan tersebut dan memberikan kebebasan bagi masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam pengakuan dan penghormatan terhadap kebudayaan serta kepercayaan yang sempat terpinggirkan di Indonesia.[2]

Kebijakan pembatasan terhadap perayaan Imlek pada masa Orde Baru didasari oleh pandangan pemerintah yang menganggap kegiatan budaya dan keagamaan etnis Tionghoa dapat mengganggu proses asimilasi nasional. Pemerintah berusaha menciptakan keseragaman budaya di tengah masyarakat dengan alasan menjaga persatuan bangsa. Perayaan Imlek dan kegiatan adat lainnya dinilai memiliki keterkaitan kuat dengan Tiongkok sebagai negeri leluhur, sehingga dianggap dapat menumbuhkan rasa ke-Tionghoaan yang berlebihan dan mengancam rasa nasionalisme. Kekhawatiran tersebut muncul karena situasi politik saat itu masih dipengaruhi oleh peristiwa 1965 yang membuat etnis Tionghoa sering dikaitkan dengan ideologi komunis. Pemerintahan order baru akhirnya mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 yang mengatur agar perayaan Imlek dilakukan secara tertutup di lingkungan keluarga. Kebijakan ini menjadi simbol pembatasan terhadap kebebasan berbudaya dan

[2] M. Dian himawan. "Deconstructing minorities in deliberative democracy." *Indonesian Journal of Democracy*, Vol. 4 No. 2 (2022): 736-737

beragama, serta memperlihatkan bagaimana pemerintah order baru saat itu menekan identitas etnis tertentu demi mencapai cita-cita kesatuan bangsa.[3]

Pembatasan terhadap etnis Tionghoa pada masa Orde Baru ternyata memberikan dampak besar terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakatnya. Keterbatasan ruang gerak di bidang politik dan budaya membuat masyarakat Tionghoa beralih untuk memusatkan perhatian pada kegiatan ekonomi, terutama perdagangan. Kebijakan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 ini justru membuat etnis Tionghoa semakin dikenal sebagai kelompok yang ulet dan berhasil dalam dunia usaha. Namun, keberhasilan tersebut juga menimbulkan kesenjangan sosial antara etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi karena adanya perbedaan taraf ekonomi yang mencolok. Kondisi ini kemudian memunculkan pandangan negatif dan rasa kecemburuan sosial di kalangan masyarakat. Di sisi lain, hubungan sosial masyarakat Tionghoa dengan masyarakat lokal tetap berjalan baik di beberapa daerah, terutama karena Masyarakat tionghoa mampu beradaptasi dan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dalam bidang ekonomi dan sosial.[4]

Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) untuk mencabut larangan perayaan Imlek dilatarbelakangi oleh keinginannya membangun kehidupan bangsa yang lebih adil dan menghormati keberagaman.

---

[3] Mima, K."Inpres No. 14 Tahun 1967: Bentuk diskriminasi pemerintah Orde Baru terhadap etnis Tionghoa." *JEJAK: Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah FKIP Universitas Jambi,* Vol. 2 No. 2 (2022): 5-6.

[4] Nurhaini, M., Bunari, & Asril. "Aktivitas perekonomian etnis Tionghoa di Siak Sri Indrapura pada masa Orde Baru (1966–1998)." *Jurnal Dinamika Sosial Budaya,* Vol.25 No 1 (2023): 6-7.

Pandangan Gus Dur yang dikenal sebagai tokoh pluralis mendorongnya untuk menegakkan prinsip kesetaraan bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, dan budaya. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menilai bahwa kebijakan pembatasan terhadap perayaan Imlek merupakan bentuk diskriminasi yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi dan kemanusiaan. Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) melihat bahwa masyarakat Tionghoa memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan budaya dan agamanya di ruang publik. Melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, ia secara resmi mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan memberikan kebebasan kepada masyarakat Tionghoa untuk merayakan Imlek secara terbuka. Disisi lain, Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) juga menetapkan bahwa masyarakat yang merayakan Imlek berhak mendapatkan hari libur pada saat perayaan berlangsung. Kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat nilai toleransi, menghapus diskriminasi, serta menegaskan kembali semangat Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar kehidupan sosial dan politik bangsa.[5]

Pasca Reformasi 1998, masyarakat Tionghoa mulai merasakan perubahan yang lebih positif dalam kehidupan sosial dan budaya di Indonesia. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjadi titik penting karena pada periode tersebut berbagai kebijakan yang

[5] Ali Mustajab. "Kebijakan politik Gus Dur terhadap China Tionghoa di Indonesia." *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5 No. (2015), 158-160.

membatasi ekspresi budaya Tionghoa dicabut secara resmi. Perayaan Imlek yang sebelumnya dilarang di ruang publik kembali diizinkan, dan simbol-simbol budaya Tionghoa tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang harus disembunyikan. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan identitas budaya tionghoa secara lebih terbuka, sekaligus memperkuat posisi etnis tionghoa dalam kehidupan sosial di tengah masyarakat. Perubahan ini juga menjadi angin segar karena turut mendorong terciptanya hubungan antar-etnis yang lebih harmonis serta menumbuhkan penerimaan yang lebih luas terhadap keberagaman budaya di Indonesia.[6]

Studi ini berfokus pada tahun 1999-2001 karena periode tersebut merupakan masa transisi penting dalam sejarah kebijakan kebudayaan Indonesia, khususnya terhadap etnis Tionghoa. Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mulai menjabat dan membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan bangsa. Tahun 2000 menjadi tonggak penting dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 yang mencabut larangan terhadap perayaan Imlek dan kegiatan kebudayaan Tionghoa di ruang publik. Tahun 2001 dipilih sebagai batas akhir karena pada masa itu masyarakat mulai merasakan secara nyata dampak dari kebijakan tersebut, baik dalam bentuk perayaan terbuka maupun penerimaan sosial di berbagai daerah. Rentang waktu 1999-2001

[6] Didi kwartanda. (Ed.), "*Tionghoa merajut keindonesiaan: Persembahan 80 tahun Leo Suryadinata".* (Penerbit Universitas Ciputra, 2023), 214.

dianggap paling relevan untuk melihat pengaruh langsung kebijakan Gus Dur terhadap pelaksanaan perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang.

Klenteng Hong San Kiong Gudo dipilih sebagai lokasi penelitian karena keberadaannya penting untuk mengungkap bagaimana pelaksanaan perayaan Imlek berlangsung sebelum dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1967. Instruksi presiden tersebut berlaku secara nasional, membatasi kegiatan budaya dan keagamaan masyarakat Tionghoa, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah perayaan Imlek di klenteng ini tetap diselenggarakan secara terbuka atau justru dialihkan menjadi kegiatan tertutup akibat tekanan kebijakan. Dengan demikian, kajian terhadap klenteng ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan kebijakan pembatasan tersebut berlangsung di tingkat lokal serta bagaimana perubahan signifikan terjadi setelah masa pemerintahan Abdurrahman Wahid yang mengindikasikan bahwa perayaan Imlek kembali dilakukan secara meriah dan terbuka. Kondisi ini menjadikan klenteng tersebut sebagai representasi penting dalam melihat transformasi sosial budaya masyarakat Tionghoa pasca pencabutan kebijakan pembatasan.

Pemilihan objek kajian ini didasarkan pada keinginan untuk melihat secara langsung dampak kebijakan pemerintah terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa di tingkat lokal. Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang dipilih karena memiliki peran penting sebagai pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan Tionghoa di daerah yang tidak sebesar kota-

kota seperti Surabaya, Semarang, atau Jakarta. Penelitian ini menjadi menarik karena menyoroti bagaimana perubahan kebijakan nasional, seperti pencabutan larangan perayaan Imlek oleh Presiden Abdurrahman Wahid, dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat di daerah. Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap perayaan Imlek di wilayah yang sebelumnya jarang disorot, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai pengaruh kebijakan pemerintah terhadap kebebasa berbudaya dan keberagaman di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang sebelum dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1967?
2. Bagaimana latar belakang pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)?
3. Bagaimana dampak pencabutan Inpres No. 14 Tahun 1967 terhadap perayaan imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang 1999-2001?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bentuk, praktik, dan karakteristik perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang sebelum dicabutnya Inpres No. 14 Tahun 1967, guna memperoleh pemahaman historis mengenai pola perayaan yang berkembang pada masa pembatasan aktivitas budaya Tionghoa.

2. Untuk memahani latar belakang Presiden Abdurrahman Wahid mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Tujuan ini dimaksudkan untuk menguraikan dasar pemikiran, nilai-nilai pluralisme, serta pandangan Gus Dur mengenai kebebasan beragama dan berbudaya di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan pencabutan larangan terhadap perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang pada tahun 1999-2001. Tujuan ini meliputi kajian tentang perubahan bentuk pelaksanaan perayaan Imlek, makna yang muncul setelah kebijakan tersebut diberlakukan, serta tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa dan non-Tionghoa dalam kegiatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian sejarah sosial dan kebudayaan di Indonesia, khususnya mengenai kebijakan pemerintah terhadap etnis Tionghoa pada masa reformasi. Disisi lain, penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik untuk meneliti isu-isu terkait keberagaman, pluralisme, dan kebebasan beragama di Indonesia.

2. Manfaat Historis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang peran Presiden Abdurrahman Wahid dalam mengubah arah

kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa. Melalui kajian ini, masyarakat dapat memahami bahwa kebijakan Gus Dur bukan hanya keputusan politik, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, toleransi, dan keadilan sosial yang menjadi bagian dari perjalanan sejarah bangsa.

3. Manfaat Sosial Budaya

Penelitian ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai perbedaan budaya dan agama sebagai bagian dari identitas nasional. Dengan mempelajari perubahan yang terjadi di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang, masyarakat dapat melihat bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi hubungan sosial dan memperkuat nilai-nilai toleransi serta kerukunan antarumat beragama.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Rencana penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai pendekatan utama untuk mengkaji pengaruh pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang tahun 1999-2001. Metode Sejarah dipilih karena, menurut Kuntowijoyo, penelitian sejarah mempelajari cara-cara melakukan penelitian dan penulisan sejarah melalui langkah-langkah seperti pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik sumber (intern dan ekstern), analisis, interpretasi, serta penyajian hasil

penelitian dalam bentuk tulisan[7]. Dengan menggunakan metode sejarah, peneliti dapat menjelaskan peristiwa masa lalu secara sistematis, objektif, dan rasional. Dalam menyusun rencana penelitian sejarah, Kuntowijoyo juga menjelaskan bahwa peneliti perlu menyiapkan beberapa unsur penting, yaitu permasalahan yang akan diteliti, historiografi, sumber sejarah, dan garis besar penelitian agar penelitian berjalan terarah dan terukur[8]. Penelitian ini disusun secara sistematis mulai dari penentuan topik, penelusuran sumber primer dan sekunder, hingga penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang menggambarkan perubahan kebijakan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Tionghoa di Gudo Jombang.

2. Tahapan Metode Penelitian Sejarah

Tahapan pertama dalam penelitian Sejarah adalah pemilihan topik. Pemilihan topik penelitian mengenai pengaruh pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang tahun 1999-2001 didasarkan pada pertimbangan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sebagaimana dikemukakan oleh Kuntowijoyo. Kedekatan emosional terlihat dari pemilihan Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu pusat kegiatan keagamaan dan kebudayaan masyarakat Tionghoa yang memiliki peran

[7] Kuntowijoyo, *"Pengantar Ilmu Sejarah"* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), 64.
[8] *Ibid, 72.*

penting dalam kehidupan sosial masyarakat setempat serta memudahkan peneliti dalam memperoleh berbagai sumber sejarah yang diperlukan. Sementara itu, kedekatan intelektual tercermin dari ketertarikan peneliti terhadap kajian sejarah sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah pada masa Reformasi, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa di Indonesia.[9] Topik ini dipilih karena kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid yang mencabut Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 merupakan peristiwa penting yang memberikan ruang bagi masyarakat Tionghoa untuk mengekspresikan identitas budaya dan melaksanakan perayaan Imlek secara terbuka. Selain memiliki nilai historis yang penting dalam memahami hubungan antara kebijakan negara dan kehidupan sosial budaya masyarakat, penelitian ini juga relevan untuk mengkaji dampak kebijakan tersebut di tingkat lokal melalui studi kasus di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian sejarah sosial dan budaya, khususnya yang berkaitan dengan pluralisme, kebebasan berbudaya, dan penghargaan terhadap keberagaman di Indonesia pada masa Reformasi.

Tahapan kedua dalam metode sejarah adalah heuristik, yaitu kegiatan mencari dan mengumpulkan berbagai sumber yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada tahap ini, peneliti berupaya menemukan

[9] *Ibid, 70*

dan mengumpulkan sumber sejarah yang relevan agar dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang diteliti. Dalam penelitian ini, pengumpulan sumber dilakukan melalui studi pustaka, studi lapangan, penelusuran arsip, sumber digital, dan wawancara.[10]

Langkah awal dilakukan dengan mencari buku, jurnal, skripsi, serta karya ilmiah yang membahas kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), masyarakat Tionghoa, dan perayaan Imlek di Indonesia. Disisi lain, peneliti juga menelusuri berbagai arsip yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa, seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, serta arsip koran yang memuat pemberitaan mengenai perayaan Imlek sebelum dan sesudah dicabutnya Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967. Untuk melengkapi data penelitian, peneliti juga mengumpulkan arsip foto dari berbagai situs web dan dokumentasi video pidato Presiden Abdurrahman Wahid pada acara Renungan Suci Tahun Baru Imlek Nasional Tahun 2001 yang diakses melalui platform YouTube.

Setelah sumber tertulis terkumpul, peneliti melakukan studi lapangan di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang dengan mengumpulkan sumber lisan melalui wawancara serta menelusuri arsip

[10] *Ibid, 74.*

yang berkaitan dengan pelaksanaan perayaan Imlek di klenteng tersebut. Wawancara dilakukan dengan dua narasumber utama, yaitu Ibu Nanik selaku Seksi Keagamaan Klenteng Hong San Kiong dan Bapak Suyoto selaku satpam klenteng sekaligus warga sekitar. Ibu Nanik dipilih karena mengetahui secara langsung pelaksanaan perayaan Imlek serta perubahan yang terjadi setelah kebijakan Gus Dur diberlakukan, sedangkan Bapak Suyoto memberikan informasi mengenai kehidupan masyarakat sekitar klenteng dan hubungan antarumat beragama dalam kegiatan perayaan Imlek. Dari hasil wawancara dengan Ibu Nanik, peneliti memperoleh dokumentasi berupa foto-foto perayaan Imlek, dokumentasi perkembangan budaya Tionghoa, serta informasi mengenai simbol dan makna bangunan klenteng. Sementara itu, dari Bapak Suyoto peneliti memperoleh sumber berupa buku Sedjarah Gudo yang membantu menjelaskan perkembangan sejarah wilayah Gudo dan keberadaan Klenteng Hong San Kiong.

Adapun hingga penelitian ini dilakukan, peneliti belum menemukan sumber sejarah yang menunjukkan adanya hubungan langsung antara Presiden Abdurrahman Wahid dengan Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang, baik berupa arsip, dokumentasi, maupun kesaksian lisan. Namun demikian, peneliti memperoleh arsip foto yang menunjukkan kunjungan Sinta Nuriyah Wahid ke Klenteng Hong San

Kiong Gudo Jombang yang kemudian digunakan sebagai sumber pendukung dalam penelitian ini.

Setelah seluruh sumber berhasil dikumpulkan pada tahap heuristik, peneliti kemudian mengklasifikasikan sumber-sumber tersebut ke dalam dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber yang berasal langsung dari masa peristiwa yang diteliti atau diperoleh dari saksi sejarah. Sumber sekunder mendukung proses analisis secara sistematis.

Dalam penelitian ini, sumber primer meliputi hasil wawancara dengan Ibu Nanik selaku Seksi Keagamaan Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang dan Bapak Suyoto selaku satpam klenteng sekaligus warga sekitar, Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, arsip koran yang memuat pemberitaan mengenai kebijakan pemerintah terhadap masyarakat Tionghoa serta pelaksanaan perayaan Imlek sebelum dan sesudah pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, arsip foto perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang, arsip foto kunjungan Sinta Nuriyah Wahid ke klenteng tersebut, serta dokumentasi video pidato Presiden Abdurrahman Wahid pada acara Renungan Suci Tahun Baru Imlek Nasional Tahun 2001 yang diakses melalui platform YouTube.

Sementara itu, sumber sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, artikel, situs web, skripsi, dan penelitian terdahulu yang

membahas kebijakan Abdurrahman Wahid, masyarakat Tionghoa, perayaan Imlek, serta sejarah Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang.

Tahapan ketiga dalam metode sejarah adalah kritik sumber, yaitu kegiatan untuk menilai keaslian, keabsahan, dan kredibilitas sumber yang telah diperoleh pada tahap heuristik. Dalam penelitian ini, kritik sumber dilakukan terhadap seluruh sumber primer maupun sumber sekunder yang digunakan. Kritik eksternal dilakukan dengan meneliti keaslian sumber, seperti Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967, Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000, arsip koran, arsip foto, dokumentasi video pidato Presiden Abdurrahman Wahid pada acara Renungan Suci Tahun Baru Imlek Nasional Tahun 2001, serta sumber lisan yang diperoleh melalui wawancara. Pada tahap ini, peneliti memeriksa asal-usul sumber, tahun penerbitan, lembaga yang menerbitkan dokumen, serta identitas narasumber untuk memastikan bahwa sumber yang digunakan merupakan sumber yang autentik dan dapat dipercaya. Selanjutnya, kritik internal dilakukan dengan menelaah isi setiap sumber untuk menilai tingkat kebenaran, konsistensi, dan relevansinya dengan topik penelitian. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dibandingkan dengan arsip, dokumen resmi pemerintah, koran, dan berbagai literatur yang relevan

guna memperoleh data yang lebih akurat dan mengurangi mengindikasikan bahwa adanya informasi yang bersifat subjektif. [11]

Melalui proses kritik sumber ini, peneliti berupaya memperoleh fakta-fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga penelitian mengenai pengaruh pemerintahan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terhadap perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang tahun 1999-2001 memiliki tingkat validitas dan objektivitas yang memadai.[12]

Tahapan keempat dalam metode sejarah adalah interpretasi, yaitu proses menafsirkan dan menghubungkan fakta-fakta sejarah yang telah melalui tahap kritik sumber. Pada tahap ini, peneliti berupaya memahami makna, hubungan, serta keterkaitan antarfakta yang diperoleh dari berbagai sumber sejarah. Interpretasi dilakukan dengan menghubungkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen pemerintah, arsip koran, arsip foto, dokumentasi video pidato Presiden Abdurrahman Wahid pada acara Renungan Suci Tahun Baru Imlek Nasional Tahun 2001, serta berbagai literatur yang relevan. Melalui proses ini, peneliti menafsirkan berbagai fakta yang berkaitan dengan kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid terhadap masyarakat Tionghoa, khususnya pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 melalui Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000. Kuntowijoyo

[11] *Ibid, 54.*
[12] *Ibid, 55.*

juga menegaskan nperbedaan dalam interpretasi tidak bisa dihindari karena setiap sejarawan dapat memiliki cara pandang yang berbeda, namun yang terpenting adalah tetap berpegang pada data dan kejujuran ilmiah.[13]

Berbagai data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan untuk memahami latar belakang kebijakan tersebut serta pengaruhnya terhadap pelaksanaan perayaan Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang pada tahun 1999-2001. Dengan demikian, tahap interpretasi digunakan untuk memberikan makna terhadap fakta-fakta sejarah yang telah diuji kebenarannya sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial budaya masyarakat Tionghoa pada masa Reformasi.

Tahapan terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi, yaitu proses penyusunan dan penulisan hasil penelitian sejarah ke dalam bentuk karya ilmiah yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tahap historiografi, seluruh data yang telah diperoleh melalui heuristik, diuji melalui kritik sumber, dan ditafsirkan pada tahap interpretasi kemudian disusun menjadi sebuah narasi sejarah yang utuh.[14] Dalam penelitian historiografi diwujudkan dalam bentuk skripsi yang membahas Pengaruh Pemerintahan Gus Dur terhadap perayaan

[13] *Ibid, 78.*
[14] *Ibid, 62.*

Imlek di Klenteng Hong San Kiong Gudo Jombang tahun 1999-2001. Penulisan dilakukan secara kronologis dan tematis berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari berbagai sumber primer dan sumber sekunder. Penyusunan hasil penelitian disesuaikan dengan sistematika penulisan ilmiah yang berlaku, sehingga setiap pembahasan dapat disajikan secara runtut, logis, dan mudah dipahami. Melalui tahap historiografi ini, hasil penelitian disajikan dalam bentuk karya ilmiah yang tidak hanya mendokumentasikan suatu peristiwa sejarah, tetapi juga memberikan pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan pemerintah dan kehidupan sosial budaya masyarakat pada masa yang diteliti.